



DIPLOMASI EKONOMI MELALUI PETISI ONLINE DI INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA

Economic Diplomacy Through Online Petition in the Indonesian Palm Oil Industry

Sindy Yulia Putri¹, Yuliani Widianingsih²

¹ Dosen Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta email: sindyyulia@upnvj.ac.id,

² Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email: yulianiwidianingsih@upnvj.ac.id

ABSTRAK: Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi *online* di *change.org* akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi *online*. Hasilnya, petisi *online* yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi *online* yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Petisi *Online*, Kelapa Sawit Indonesia

ABSTRACT: *Economic diplomacy in the realm of the palm oil industry has actually become a concern during the administration of President Joko Widodo. This diplomacy can be carried out by non-state actors, such as Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). The purpose of this study was to examine the diplomatic efforts made by SPKS actors in improving the welfare of small palm oil farmers and attracting investment for various oil palm rejuvenation programs. The method used is a qualitative approach with a case study method. This research is a case of the implementation of economic diplomacy by non-state actors. As a result, online petitions conducted by SPKS have been able to attract public attention, but still need support from the government. The conclusion of this research is that there needs to be synergy between ministries in Indonesia and entrepreneurs to support online petitions conducted by SPKS, such as the Ministry of Agriculture, the Oil Palm Plantation Fund Management Agency (BPDPKS), the Ministry of Industry, the Ministry of Finance, Bappenas, and the Investment Coordinating Board (BKPM). All of these parties collaborate to improve the quality of domestic palm oil, develop competence, and improve the welfare of oil palm farmers.*

Keywords: *Economic Diplomacy, Online Petition, Indonesian Palm Oil*

PENDAHULUAN

Diplomasi ekonomi pada dasarnya merupakan suatu upaya komunikasi resmi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara ataupun pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengedepankan berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Diplomasi ekonomi biasanya digunakan untuk menjembatani dua negara dalam menyelaraskan kebutuhan ekonomi masing-masing di berbagai kegiatan ekonomi seperti perdagangan, bisnis, komersial, perbankan, dan investasi. Negara berperan mengimplementasikan praktik advokasi dan negosiasi dalam berbagai kebijakan [1]. Seiring berjalannya waktu, terdapat pergeseran aktor di ranah diplomasi. Muncul berbagai aktor baru selain negara yang menjalankan fungsi-fungsi kediplomatan di lingkup korporasi atau *Multi-National Corporation* (MNC), *Non-Governmental Organization* (NGO), komunitas sosial, dan individu. Pergeseran aktor inilah yang memunculkan berbagai aktivitas diplomatik yang sesuai dengan kapasitas para aktor sesuai profesinya. MNC misalnya bergerak dari ranah operasionalisasi perusahaan, NGO merepresentasikan kalangan masyarakat, sementara komunitas dan individu dapat mengimplementasikan praktik diplomasi melalui ranah digital [2].

Lebih jauh lagi, diplomasi ekonomi juga merepresentasikan wujud ketahanan nasional. Industri minyak sawit nasional merupakan industri

strategis dalam perekonomian makro, pembangunan ekonomi daerah, pengurangan kemiskinan. Dalam perekonomian makro, industri minyak sawit berperan strategis sebagai sumber devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas bumi, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, ekonomi kerakyatan, dan rumah bagi tenaga kerja sebesar lebih dari 10 juta per tahun dan meningkat sebesar 2.5 juta orang tiap tahunnya [3]. Industri ini membutuhkan upaya penuh dari segenap pihak dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan diplomasi ekonomi untuk mengembangkan sektor unggulan Indonesia tersebut. Indonesia saat ini bahkan sudah menjadi negara produsen dan pengekspor produk Kelapa Sawit yang terbesar di pasar dunia. Lebih dari 40% kebutuhan minyak sawit dunia dipasok dari Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, kebutuhan terhadap minyak sawit juga dipicu oleh penggunaannya sebagai sumber energi yang terbarukan, menggantikan bahan bakar fosil [4]. Sementara aktor non-negara seperti Serikat Petani Kelapa Sawit berupaya membantu visi misi pemerintah dalam mengembangkan industri sawit melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan petani. Hal tersebut dapat dioptimalkan jika investasi untuk petani dioptimalkan. Kerangka



petisi *online* merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam permasalahan publik atau penyaluran aspirasi terkait isu-isu sosial bahkan kritik terhadap lembaga pemerintah atau korporasi swasta. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berhasil memfasilitasi keterlibatan masyarakat seperti penggalangan dukungan terhadap satu isu secara sederhana yakni hanya dengan menandatangani petisi secara virtual tanpa menghabiskan banyak biaya, tenaga, dan waktu. *Change.org* merupakan kerangka petisi *online* yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka atau sebagai wadah untuk perubahan. Masyarakat di *change.org* memulai kampanye, memobilisasi pendukung serta bekerja sama dengan para pengambil keputusan sebagai upaya menemukan solusi baru bagi masalah besar maupun kecil yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Pada dasarnya petisi *online* tidak hanya ditujukan kepada pemerintah saja melainkan pihak swasta [5].

Salah satu petisi *online* yang saat ini sedang menggalang dukungan yaitu petisi “Alihkan Suntikan Dana Untuk Perusahaan Sawit ke Petani” yang dibuat oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Petisi ini dibuat pada tanggal 17 Januari 2018, bermula dari kabar bahwa lima konglomerat mendapatkan suntikan dana sebesar 7.5 triliun. Padahal dalam UU 39/2014 tentang Perkebunan disebut kalau ada dana perkebunan dari pungen

ekspor sawit yang bisa disalurkan ke petani untuk modal, promosi, atau pengembangan SDM dan teknologi pertanian. Namun ada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang malah digunakan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan sawit besar. Menurut SPKS, secara hukum PP 24/2015 itu sudah menyalahi tujuan dari UU Perkebunan. Akibat dari PP tersebut sekitar 5 juta petani sawit tertinggal jauh dalam SDM, pendanaan, dan teknologi. Petisi ini telah diajukan uji materi ke Mahkamah Agung dengan harapan petisi tersebut meraih kemenangan dan mampu mengubah kebijakan yang telah agar para petani kelapa sawit mendapatkan hak-hak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka [6].

Dalam ilmu hubungan internasional, petisi *online* merupakan sebuah bentuk dari diplomasi publik. Berbagai aktor non-negara seperti komunitas, NGO, asosiasi pengusaha, sivitas akademika, dan bahkan individu memiliki peluang untuk menerapkan diplomasi publik. Viotti dan Kauppi mengelompokkan beberapa unit analisis dalam ilmu hubungan internasional, dari mulai pemerintah, kelompok-kelompok lobi kepentingan, institusi, NGO, dan individu. Ia menegaskan, bahwa berbagai kelompok masyarakat memiliki *soft power* dalam berdiplomasi dan membentuk sebuah jaringan untuk memberikan analisis yang komprehensif

kepada pemerintah. Bahkan beberapa dari mereka memiliki pusat kajian tersendiri untuk membuat *research and development* (R&D) untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mereka mampu menyuarakan aspirasi masyarakat ke elit politik dan *stakeholders*. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan eksistensi diri dan dalam tingkatan yang lebih tinggi, mereka mampu menggiring dan membentuk opini publik untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Mereka memanfaatkan elektronik dan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dan membentuk komunitas untuk memberikan masukan, saran, analisis, dan pandangan mereka kepada para elit politik [7]. Dalam konteks petani sawit, kelompok petani dan masyarakat yang peduli akan kesejahteraan petani sawit membuat sebuah petisi untuk melakukan *blow up* di media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Hingga saat ini sebanyak 80.715 orang telah menandatangani petisi tersebut [8].

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penggunaan metode ini didasarkan pada pemikiran induktif [9] yang mencakup pada pendekatan naturalistik terhadap subjek kajian untuk menginterpretasikan fenomena yang ada. Jenis penelitian ini adalah deskriptif [10]. Terkait pada fokus penelitian yakni peneliti ingin menganalisis strategi lobi yang digunakan oleh pihak *change.org* sebagai upaya untuk mengubah

kebijakan.

Seperti yang telah disampaikan sebekumya, bahwa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus berarti mengkaji kasus sekaligus hasil dari proses kajian tersebut, sehingga melalui studi kasus penelitian ini diharapkan mendapatkan daya yang lebih dalam dan spesifik dalam mengkaji strategi lobi pihak *change.org* agar dapat mengubah kebijaksanaan pemerintah. Studi kasus tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana dan mengapa. Esensi dari studi kasus sendiri yakni terdapat kasus yang dibatasi oleh waktu atau aktivitas yang mempunyai keunikan untuk diteliti, maka selama peneliti membahas satu kasus berarti selama itu pula peneliti melakukan studi kasus [11].

Beberapa pemaparan di ataslah yang menjadi dasar peneliti untuk menggunakan studi kasus dalam penelitian ini, terlihat jelas di rumusan masalah berkenaan dengan “bagaimana”. Selain itu fokus masalah pada penelitian ini adalah mencoba untuk mengeksplorasi strategi lobi *change.org* untuk merubah kebijakan pemerintah melalui petisi *online* “Alihkan Suntikan Dana Untuk Perusahaan Sawit ke Petani!” Tahun 2018. Kasus tersebut menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana strategi lobi yang dilakukan *change.org* agar mengubah kebijakan

pemerintah terkait suntikan dana untuk perusahaan sawit ke petani.

Sementara konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konsep petisi online. Dalton mengungkapkan, bahwa petisi adalah salah satu bentuk paling lama dari partisipasi politik, terutama bagi mereka yang berusaha membawa masalah ke perhatian pembuat kebijakan dan publik. Namun sejak kehadiran teknologi digital semakin memudahkan masyarakat untuk menandatangani petisi dan menyebarkannya. Petisi *online* merupakan permintaan kepada otoritas publik, biasanya lembaga pemerintah atau parlemen. Petisi *online* disebut juga cara non-konfrontatif untuk mengkritik tindakan atau kebijakan pemerintah dan biasanya fokus pada satu masalah atau tujuan. Tidak berbeda dengan petisi tradisional, petisi *online* memiliki tujuan mengubah kebijakan publik, panggilan untuk pernyataan resmi atau membangkitkan tindakan tertentu oleh lembaga publik [12].

Lindner dan Riehm mengungkapkan, bahwa petisi *online* terdiri dari tipe formal dan informal. Tipe formal dioperasikan oleh lembaga publik sedangkan informal dioperasikan oleh organisasi non pemerintah. Petisi *online* informal biasanya disampaikan kepada lembaga publik oleh pengelola setelah mengumpulkan sejumlah tanda tangan. Petisi *online* informal dapat dibedakan menjadi petisi *online* yang diinisiasi oleh LSM sebagai bagian dari kampanye politik dan petisi *online* yang dioperasikan

oleh organisasi swasta, baik komersial maupun non-profit yang menyediakan infrastruktur berbasis internet untuk memulai petisi *online* dan mengumpulkan tanda tangan *online*. Merujuk pada pengertian tersebut, tipe *change.org* Indonesia merupakan kerangka petisi *online* informal yang dikelola oleh organisasi swasta. Dalam kategori fungsi petisi, ditemukan dua temuan yaitu pada bagian individu mengenai mobilisasi pendukung dan membantu komunitas, juga pada bagian organisasi menjadi indikator politik [13]. Menurut Simamora, untuk fungsi petisi pada individu, pelaksanaan petisi *Change.org* Indonesia meliputi fasilitas pengaduan atau keluhan masyarakat kepada pemerintah atau korporasi, membantu pembuatan atau perubahan kebijakan tertentu, membantu memasukkan isu yang dipetisikan ke dalam agenda target petisi (pembuat kebijakan), memobilisasi pendukung dan LSM terkait isu tertentu, serta membantu komunitas untuk menarik perhatian media massa [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada teori diplomasi ekonomi dan konsep petisi *online* yang telah dipaparkan sebelumnya, beragam aktor dapat melaksanakan praktik diplomasi sesuai dengan profesi dan kapasitasnya. Negara, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, menerbitkan berbagai

kebijakan terkait regulasi perkebunan sawit dan penanaman modal di industri kelapa sawit. Jika bicara investasi, diperlukan investasi yang bernilai sedikitnya USD 50 juta untuk mengubah lahan/hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berbuah seluas 10.000 hektar [15]. Untuk di perkebunan sendiri, target investasi selama lima tahun mendatang mencapai Rp 1.567,1 triliun. Dengan rincian, kelapa sawit (integrasi sawit-sapi-jagung) 70%, tebu sebesar 26%, tembakau 1% dan lainnya (karet, kopi, kakao, rempah) 3%. Investasi di subsektor perkebunan diarahkan ke industri hilirnya karena nilainya akan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sebatas hulu. Agar nilai ekspor perkebunan dapat meningkat, diperlukan adanya percepatan investasi. Data BKPM, investasi di pertanian selama 2009-2013 masih rendah, yakni hanya sebesar Rp 96,1 triliun. Kemudian pada periode tahun 2014-2018 meningkat 150,7% atau Rp 240,8 triliun. Hingga tahun 2019 terdapat 514 calon investor yang tertarik berinvestasi di subsektor perkebunan. Itu nilainya cukup tinggi, yakni sekitar Rp 313 triliun [16].

Kemudian untuk mendorong industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit, BKPM sendiri menjadikan sektor tersebut menjadi salah satu prioritas pemasaran investasi sebagai bagian dari industri berorientasi ekspor. Sedangkan, guna meningkatkan iklim investasi, BKPM melalui PTSP Pusat, telah melakukan penyederhanaan dan percepatan perizinan di sektor perkebunan, dari 615 hari dengan 20 prosedur izin menjadi 212 hari

dengan 12 prosedur izin. Pemerintah juga sudah berupaya untuk meningkatkan investasi sektor kelapa sawit dengan menetapkan empat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit yaitu KEK Sei Mangkei yang terletak di Provinsi Sumatera Utara (dengan luas ± 2.002 Ha), KEK Tanjung Api-Api yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan (dengan luas ± 2.030 Ha), KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur (dengan luas ± 557 Ha), serta KEK Morotai yang terletak di Provinsi Maluku Utara (dengan luas ± 1.101 Ha). Pemerintah juga bekerja melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengembangkan industri sawit. Hingga tahun 2019, kelapa sawit menyumbang 13,5% ekspor non-migas, mendorong 3,5 % dari total PDB, dan menjamin keamanan energi sebesar 9,1 juta kilo liter. Sektor industri sawit juga mempekerjakan sekitar 23 juta petani mencakup petani swadaya, pekerja langsung, dan pekerja tak langsung. BPDPKS dihimbau berkontribusi nyata terhadap pembangunan industri sawit tanah air. BPDPKS menjalankan perannya meningkatkan kinerja ekspor Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2015 [17]. BPDPKS memiliki tiga program kerja, yaitu [18]

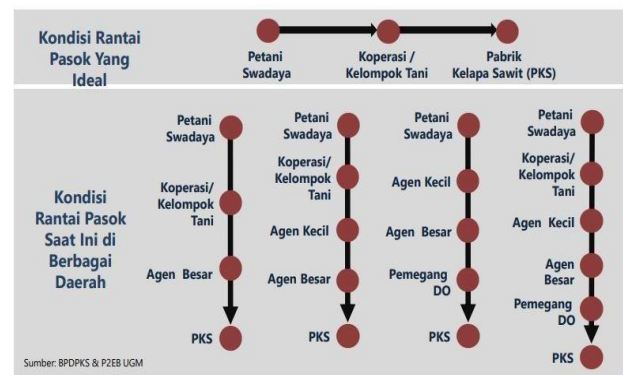
1. Stabilitas harga *crude palm oil* (CPO) dengan mengkonsolidasi data luas lahan

dan produksi sawit. Perbaikan data dilakukan untuk mengetahui kondisi suplai CPO yang lebih akurat. Kemudian, penyerapan sawit domestik melalui penerapan B20 dan B30 secara penuh dan perluasan pasar ekspor baru, seperti Cina, Pakistan & Bangladesh.

2. Perbaikan dukungan untuk petani sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran seperti pendataan petani sawit rakyat & penyediaan kartu pekebun sawit. diharapkan terdatatnya 100% petani sawit rakyat dan telah 100% kartu pekebun sawit didistribusikan kepada seluruh pekebun sawit yang mempunyai rekening pada bank. BPDPKS juga mendukung perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/program peningkatan daya saing melalui perbaikan tata kelola pasokan dari petani ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan perbaikan infrastruktur logistik. Tata kelola yang dimaksud mencakup model penyaluran dana kelapa sawit kepada pekebun rakyat yang terintegrasi dan perbaikan regulasi dan implementasi tata niaga TBS ditingkat pekebun rakyat. Selain itu, terdapat penyediaan layanan informasi kepada petani sawit rakyat mengenai penyediaan referensi harga tandan buah segar (TBS) dan aplikasi petani sawit dan *information center* kelapa sawit.
3. Investasi pada industri hilir melalui program konversi sawit menjadi *bio-hydrocarbon fuel*.

BPDPKS memberikan dana riset untuk pembuatan katalis dan insentif kepada produsen *bio-hydrocarbon fuel*. Kemudian investasi pada program hilirisasi lainnya seperti insentif kepada industri oleokimia.

Di sisi lain, faktor determinan dari rendahnya kesejahteraan petani sawit adalah panjangnya rantai pasok TBS dari petani ke PKS. Jika seharusnya rantai pasok sawit hanya dari petani swadaya, lalu koperasi atau kelompok tani, dan terakhir PKS. Namun realitanya, rantai tersebut menjadi lebih panjang karena adanya agen-agen sawit dan pemegang *delivery order* (DO). Berikut dijelaskan lebih rinci dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Rantai Pasok Tandan Buah Segar (TBS) dari Petani Sawit ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

BPDPKS juga telah berupaya mendukung perbaikan rantai pasok petani sawit rakyat/program peningkatan daya saing,



seperti upaya memperbaiki harga TBS di tingkat petani. Selain dilakukan melalui upaya peningkatan *demand* CPO, diperlukan dukungan perbaikan rantai pasok dan peningkatan daya saing di tingkat petani. Hal ini disebabkan karena selain harga CPO, harga TBS juga ditentukan oleh kemampuan PKS dalam melakukan pengolahan TBS menjadi CPO, serta biaya transportasi dan panjangnya rantai pasok serta pemasaran. Rantai pasok TBS dari petani swadaya ke PKS umumnya cukup panjang yang melibatkan setidaknya koperasi/kelompok tani, agen besar, agen kecil dan pemegang DO. Panjangnya rantai pasok TBS tersebut mengurangi keuntungan petani karena setiap titik pasok turut mengambil keuntungan dari penjualan TBS. Oleh karena itu, salah satu program penyaluran dana BPDPKS untuk memperbaiki kesejahteraan petani adalah melalui dukungan perbaikan rantai pasok dan peningkatan daya saing [19].

Selain pemerintah, aktor non-negara juga turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Beberapa organisasi petani kelapa sawit Indonesia seperti Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Asosiasi Petani Sawit PIR (Aspekipir) Indonesia, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Asosiasi Sawitku Masa Depan (Samade) [20]. SPKS misalnya telah merilis petisi *online* untuk memacu investasi ke petani sawit, tidak hanya ke pengusaha besar. Berdasarkan UU 39/2014 tentang perkebunan

disebutkan bahwa terdapat ada dana perkebunan dari pungutan ekspor sawit yang bisa disalurkan ke petani untuk modal, promosi, atau pengembangan SDM dan teknologi pertanian. Tetapi nyatanya ada Peraturan Pemerintah (PP) 24/2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan yang malah digunakan untuk memberikan subsidi kepada perusahaan sawit besar. Pada 2016 misalnya, BPDPKS mengumpulkan pungutan dana Rp 11,7 triliun. 90% digunakan untuk subsidi ke grup besar perusahaan-perusahaan produsen kelapa sawit, sementara 10% sisanya di alokasikan untuk kegiatan penelitian, petani, dan promosi kelapa sawit [21].

Pada dasarnya, berbagai organisasi sawit berupaya meningkatkan kemampuan (*skill*) petani dan kesejahterannya. Pemangku kepentingan industri sawit Indonesia, yakni Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Jejaring Pekerja Buruh Sawit Indonesia (Japbusi) bekerja sama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kerja serta kesejahteraan tenaga kerja industri perkebunan kelapa sawit melalui sosialisasi, pelatihan dan *sharing best practice*. Dalam dialog antara Gapki dan Japbusi di Hotel Crown Jakarta, Jumat (26/4/2019), keduanya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional dan berbagai pihak pemerhati sawit untuk berbagi

informasi, pengetahuan terkait tata kelola sawit berkelanjutan. Kedua asosiasi ini juga siap bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ketenagakerjaan di industri kelapa sawit. Diharapkan, sikap positif ini makin mendukung peran industri kelapa sawit agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Tidak hanya unsur pengusaha dan buruh, dalam dialog tersebut kedua belah pihak turut mengajak pemerintah untuk ikut serta secara aktif dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kondisi tenaga kerja dan petani kelapa sawit Indonesia melalui regulasi-regulasi yang mengatur secara khusus tentang ketenagakerjaan sektor perkebunan kelapa sawit [22].

Selain itu, organisasi sawit juga mendukung penerapan Peraturan Presiden *Indonesia's Sustainable Palm Oil* (ISPO). Kesepakatan ini dipaparkan masing-masing ketua organisasi atau yang mewakili dalam acara "Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2019: Penguatan SDM dan Kelembagaan Petani Basis Kesuksesan Petani Sawit" pada 27 November 2019 berlokasi di Hotel Aston, Pontianak, Kalimantan Barat. Upaya perbaikan tata kelola yang sedang dilakukan pemerintah sedianya didukung semua pihak, termasuk mendorong petani kelapa sawit untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Kemitraan adalah kunci sukses dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani, sekaligus sebagai jaminan dalam

pemenuhan pasokan buah sawit. Kemitraan juga merupakan solusi untuk penetapan harga petani kelapa sawit, karena ada jaminan harga yang akan sesuai dengan harga yang telah ditetapkan Dinas setempat. Perpres ISPO menjadi pintu bagi keberlangsungan petani kelapa sawit. Terlebih lagi, ISPO menjajikan adanya perbaikan tata kelola dan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan *good agricultural practices* (GAP) dan penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan [23]. Saat ini hanya sekitar 1,36% luas perkebunan kelapa sawit (40 perusahaan) yang sudah bersertifikat ISPO di seluruh Indonesia. Padahal pemerintah menargetkan bahwa paling lambat 31 Desember 2014, semua perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah memiliki IUP harus sudah mendapatkan sertifikasi ISPO. Di Kalimantan, sertifikat ISPO baru dimiliki oleh 13 perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan luas total sekitar 124.740 hektar [24].

Kemitraan petani dengan perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO juga akan memudahkan peminjaman modal dari Bank. Bank lebih menyukai komoditas seperti minyak sawit, karet, dan produk-produk turunannya. BRI juga memberikan pinjaman untuk petani plasma yang terlibat dalam skema perkebunan kelapa sawit rakyat dan nukleus. BRI misalnya mendanai sejumlah perusahaan minyak sawit yang memiliki kegiatan operasi besar di

Indonesia, termasuk Tunas Baru Lampung, Sampoerna Agro, Gozco Plantations, Provident Agro, Perkebunan Nusantara, dan Salim Ivomas Pratama, dan mungkin lebih banyak lagi. Kemudian Sinarmas menjalin kemitraan dengan perusahaan dan petani plasma swadaya di Provinsi Kalimantan Timur seluas 7.280 hektar. Imbuhnya, kemitraan dengan petani plasma swadaya dilakukan di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kongbeng, Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Telen dan Kecamatan Batu Ampar. Kerjasama terluas dilakukan di wilayah Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, dimana telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, lantaran sebagian besar masyarakat telah memiliki kebun sawit. Pembangunan kebun sawit milik petani swadaya di wilayah Kecamatan Kongbeng ini, sebagian besar dilakukan secara swadaya oleh masyarakat.

SIMPULAN

Diplomasi ekonomi di masa revolusi industri 4.0 semakin memperkuat eksistensi aktor non-negara seperti organisasi sawit. Berbagai organisasi sawit menggunakan petisi *online* sebagai alat advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih memperhatikan investasi untuk pemeliharaan dan peremajaan sawit petani kecil yang berimpikasi pada kesejahteraan petani. Kerangka petisi *online* di industri kelapa sawit dapat dikatakan berhasil secara *intermediate*, yaitu mampu menangkap perhatian pemangku

kepentingan dan partisipasi masyarakat. Pengaruh petisi online mungkin tidak besar, namun tetap memperoleh perhatian pemerintah dan masyarakat. Pemerintah semakin memperkuat kemitraan dengan pengusaha, pihak bank, organisasi sawit, hingga individu terkecil yaitu petani untuk mengembangkan kualitas sawit dan memperpendek rantai birokrasi untuk meningkatkan taraf hidup petani kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Baranay, P. (2009). *Modern Economic Diplomacy*. Publications of Diplomatic Economic Club.
- [2] Saner, R, L. Yiu. (2011). *International Economic Diplomacy: Mutations in Post-Modern Times*. *Netherlandonals Institute of International Relation*. *Cliengendael*. ISSN 1569-2981.
- [3] "Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024". Kementan RI.
- [4] Kementerian Pertanian (2015) di dalam Rizka Yunikartika (2015). *Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan*. INTIP HUTAN-Forest Warch Indonesia._
- [5] Halpin, D., Vromen, A., Vaughan, M., & Raissi, M. (2018). *Online petitioning and politics: the development of Change.org in Australia*". *Australian Journal of Political Science*, 53(4):428-445.



- [6] Change Organization. (2018). "Alihkan Suntikan Dana Untuk Perusahaan Sawit ke Petani".
- [7] Viotti, P. R., Kauppi, M. V. (2010). *International Relations Theory*. New York: Pearson.
- [8] Change Organization. (2018). "Alihkan Suntikan Dana Untuk Perusahaan Sawit ke Petani".
- [9] Burhan, B. (2nd Eds). (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitas: Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana
- [10] Denzin, N. K., Lincoln. Y. S. (3rd Eds). (2005). *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications Inc.
- [11] Yin, R. (4th Eds). (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications Inc.
- [12] Dalton, R. J. (2008). *Citizenship norms and the expansion of political participation*. *Political Studies* 56(1): 76-98.
- [13] Ralf, L., Riehm-Ulrich. (2009). *Electronic Petitions and Institutional Modernization International Parliamentary E-Petitions Systems in Comparative Perspective* (Volume 1, No. 1, pp. 34-57). *JeDEM - eJournal of eDemocracy an Open Government*.
- [14] Rahma, S. (2017). *Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.org Indonesia Periode 2015-2016*. (Volume VI, No. 1, pp. 57-67). *Jurnal Komunikasi Indonesia*.
- [15] Svatoňová, T. H. D, A. Kabutey. (2015). *Financial Profitability and Sensitivity Analysis of Oil Palm Plantation in Indonesia*. Czech University of Life Sciences Prague.
- [16] Info Sawit tahun 2007 tentang Kelapa Sawit Mendominasi Investasi Perkebunan 5 Tahun Mendatang.
- [17] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tahun 2020 tentang BPDPKS Harus Berkontribusi terhadap Industri Kelapa Sawit.
- [18] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2019 tentang Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Program Strategis BPDPKS.
- [19] Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tahun 2019 tentang Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Program Strategis BPDPKS.
- [20] ISPO, RSPO, UNDP tahun 2015 tentang Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO.
- [21] Serikat Petani Kelapa Sawit tahun 2020 tentang Tata Kelola BPDP-KS Yang Buruk Merugikan Petani Sawit.
- [22] Kunjana, L. G. (2019). "Gapki-Japbusi Sepakat Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Sawit". *Investor Daily*.
- [23] ISPO, RSPO, UNDP tahun 2015 tentang Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO.
- [24] Yunikartika, R. (2015). *Ekspansi Kelapa Sawit di Pulau Kalimantan*. Intip Hutan-Forest Warch Indonesia.